

PELUANG DAN RISIKO KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM NEW
DEVELOPMENT BANK: KAJIAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM
ORGANISASI INTERNASIONAL

Oleh:

Andi Muhammad Ridha*

INTISARI

Keputusan Indonesia bergabung dengan New Development Bank (NDB) menempatkannya di tengah dinamika baru kekuasaan finansial global. Berbeda dari IBRD, ADB, dan AIIB, NDB menawarkan struktur pemungutan suara tanpa hak veto tunggal sekaligus menghadirkan dominasi negara pendiri BRICS yang perlu dicermati. Penelitian normatif ini menelaah bagaimana sistem pemungutan suara tersebut membentuk peluang dan risiko bagi Indonesia, serta strategi apa yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan pengaruhnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meski posisi suara Indonesia lebih terbatas dibanding negara pendiri, NDB tetap membuka ruang pendanaan yang lebih fleksibel dan relatif bebas dari hegemoni veto. Untuk menavigasinya, Indonesia perlu memperkuat posisi internal, membangun koalisi dengan negara berkembang non-pendiri, dan mengoptimalkan kontribusi ekonominya. Dengan demikian, keanggotaan di NDB bukan sekadar akses pendanaan, melainkan arena strategis yang menuntut diplomasi finansial.

Kata kunci: *New Development Bank*, Sistem Pemungutan Suara, Hukum Organisasi Internasional.

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

*OPPORTUNITIES AND RISKS OF INDONESIA'S MEMBERSHIP IN THE NEW
DEVELOPMENT BANK: A STUDY OF DECISION-MAKING IN
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS*

Oleh:

Andi Muhammad Ridha

ABSTRACT

Indonesia's decision to join the NDB positions the country within a new landscape of global financial power. Unlike the IBRD, ADB, and AIIB, the NDB features a voting structure without a single veto power, while still reflecting the significant influence of its BRICS founding members. This normative study examines how the voting system shapes both opportunities and risks for Indonesia, as well as the strategies the country may adopt to maximize its influence. The findings indicate that although Indonesia's voting share is more limited than that of the founding members, the NDB nevertheless offers more flexible financing options and a governance environment relatively free from veto hegemony. To navigate this system, Indonesia must strengthen its internal position, build coalitions with non-founding developing countries, and optimize its economic contributions. Consequently, Indonesia's membership in the NDB represents not merely access to financing, but a strategic arena that demands financial diplomacy..

Keywords: New Development Bank, Voting System, International Organizational Law.

* *Student of the Magister in Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.*